

Sosialisasi Series #2 PPI

Mekanisme Penegakan
KEKPP dan Pembentukan
PPI Wilayah

oleh Divisi Penegakan Etika
& Perilaku Periset, serta
Divisi Organisasi & Penguatan
Wilayah DPP PPI

**SELASA,
25 OKTOBER 2022**
9.00 - 12.00 wib

LIVE



MEETING ID : 869 0691 5493
PASSCODE : PPIOPW



<https://youtu.be/5HREa77s5Bg>

Info lebih lanjut:

IG: [perhimpunan_periset_indonesia](#)
[kantortvirtual.periset.or.id](#)

Dewan Pengurus Pusat
Perhimpunan Periset Indonesia
(DPP PPI)



Sambutan

Dr. I Nyoman Jujur

Wakil Ketua Umum
DPP PPI

Narasumber

Dr. Hendro Tjahjono

Ketua Div. KEKKP

Dr. Lukman Sholahuddin

Ketua Div. OPW



Menuju PPI Wilayah yang Kuat, Bermanfaat, dan Akuntabel

Lukman Shalahuddin

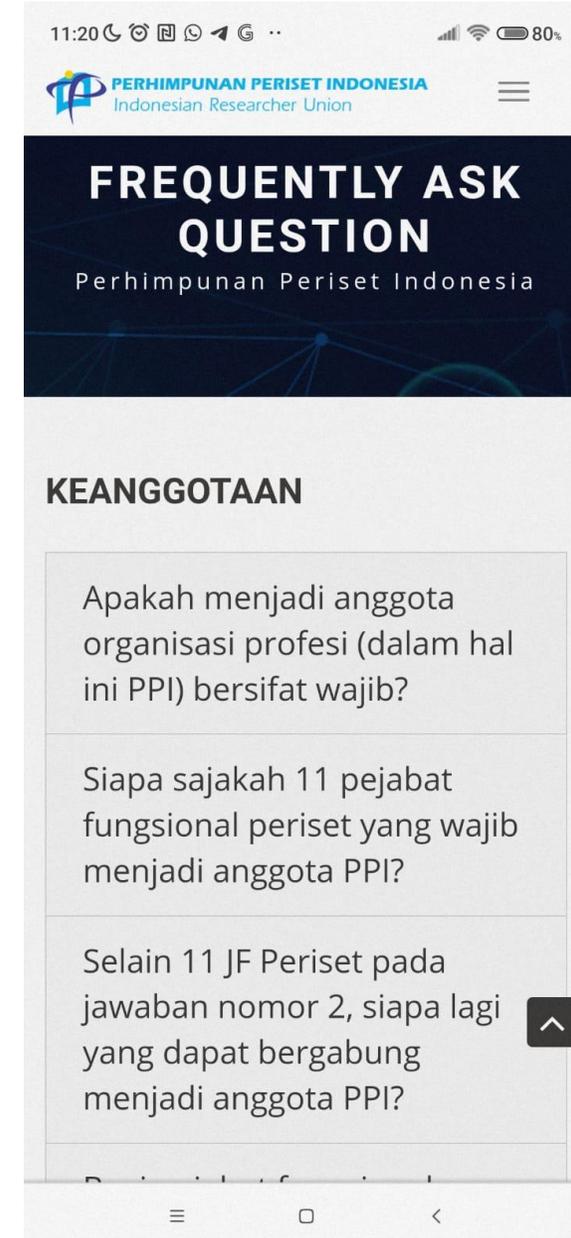
Ketua Divisi Organisasi & Penguatan Wilayah (OPW)

Disampaikan pada Sosialisasi #2 tentang
Pembentukan PPI Wilayah

25 Oktober 2022

Pendahuluan/ Latar Belakang

- Pentingnya PPI, dan manfaatnya bagi anggota
- Hubungan PPI dan BRIN
- Perbedaan peran/ fungsi PPI dan BRIN
- Hubungan PPI wilayah dan BRIDA
- Status keanggotaan (1 kali dalam setahun)
- Iuran anggota dibelanjakan untuk apa
- Hak keuangan daerah
- Besarnya iuran yang berbeda2, mengapa dan kapan pemberlakuannya



STRUKTUR ORGANISASI DPP PPI

KEPALA BRIN

MAJELIS
KEHORMATAN
PERISET

KOMISI
PROFESI
PERISET

KETUA UMUM

WAKIL KETUA UMUM

DEWAN
PENGAWAS

DEWAN
PAKAR

PENGURUS PUSAT PPI

BENDAHARA UMUM

2 WABENDUM

SEKRETARIS JENDERAL

5 WASEKJEN: **1**, **2**, **3**, **4**, **5**

DIREKTUR EKSEKUTIF/
KEPALA SEKRETARIAT

DIVISI
KEANGGOTAAN

DIVISI
ORGANISASI
&
PENGUATAN
WILAYAH

DIVISI
HUKUM
& HAM

DIVISI
ADVOKASI &
KEKAYAAN
INTELEKTUAL

DIVISI
PENEGAKAN
ETIKA &
PERILAKU PERISET

DIVISI
KOMUNIKASI
INFORMASI &
DIGITALISASI

DIVISI
SINERGI ANTAR
LEMBAGA

BADAN
PENGEMBANGAN
USAHA PPI

BADAN OTONOM PENGEMBANGAN
PROFESI PERISET

PPI LEARNING
CENTRE

PPI INSTITUTE

LSP & PENJAMINAN
MUTU PERISET

PENGURUS WILAYAH

Majelis Kehormatan Periset

1. Menyusun Peraturan Organisasi terkait Penegakan KEKPP;
2. Membentuk Majelis Sidang Kehormatan Periset
3. Menyelenggarakan Sidang Kehormatan Periset
4. Menyampaikan hasil Sidang Kehormatan Periset secara tertulis kepada Ketua Umum
5. Merehabilitasi pihak terkait apabila hasil keputusan Sidang Kehormatan Periset menyatakan tidak ada pelanggaran

Komisi Profesi Periset

1. Membentuk subkomisi untuk setiap profesi Periset tertentu ;
2. Memberikan masukan kepada Pengurus Pusat dalam mengembangkan basis data keprofesian Periset ;
3. Memberikan masukan kepada PP, Pengurus Prov, dan Pengurus Kab/ Kota untuk menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan profesionalisme profesi Periset , serta pencegahan pelanggaran etika dan/ atau perilaku profesi Periset ;
4. Bekerja sama dengan lembaga pembina profesi Periset ASN dalam mengembangkan dan memelihara standar kompetensi profesi Periset nasional dan global.

Dewan Pengawas

1. Melakukan reviu, monev atas pelaksanaan Program Kerja PP, Pengurus Prov, dan Pengurus Kab/ Kota;
2. Memberikan masukan kepada PP, Pengurus Prov, dan Pengurus Kab./ Kota mengenai pelaksanaan program kerja yang baik, efektif dan efisien

Dewan Pakar

1. Memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum PPI terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis;
2. Memberikan pertimbangan kepada DPP tentang Anggota Kehormatan;
3. Merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Periset dalam maupun luar negeri yang dianggap layak;
4. Memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru;
5. Merekomendasikan penghargaan untuk capaian hasil litbangjirap yang berkualitas

Divisi Keanggotaan

1. Menyusun rencana program tahunan Divisi Keanggotaan ;
2. Menyusun sistem tata kelola keanggotaan secara digital;
3. Membuat peta komunitas periset
4. Melakukan sosialisasi terkait keanggotaan dan kegiatan lain,

Divisi Hukum dan HAM

1. Menyusun Pedoman Penegakan KEKPP;
2. Membuat rencana program tahunan Divisi Hukum dan HAM;
3. Menyusun peraturan dan surat keputusan organisasi
4. Memberikan bantuan hukum kepada anggota PPI;
5. Melakukan harmonisasi regulasi organisasi

Divisi Advokasi dan Kekayaan Intelektual

1. Menyusun rencana program tahunan Divisi AKI
2. Menyusun juklak dan juknis Advokasi
3. Melaksanakan advokasi bagi anggota
4. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait permasalahan HKI;
5. Melakukan monev

Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah

1. Membuat rencana program tahunan Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah
2. Menyusun program pembentukan pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/ Kota
3. Menyusun penguatan kelembagaan
 - a. Pemberdayaan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/ Kota
 - b. Harmonisasi Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Kab/ Kota
4. Melakukan monitoring aktivitas Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/ Kota.

Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset

1. Menyusun rencana program tahunan Divisi PEPP
2. Bersama Divisi HukHAM menyusun Petunjuk Teknis Penegakan KEKPP;
3. Melakukan sosialisasi KEKPP;
4. Atas penunjukkan Ketua Umum , menjadi Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran KEKPP maupun dalam Majelis KP
5. Melakukan penuntutan terhadap terduga pelanggar dalam Majelis Sidang Kehormatan , dan melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara

Divisi Sinergi Antar Lembaga

Divisi Komunikasi , Informasi dan Digitalisasi

Tugas Div OPW

1. Membuat rencana program tahunan Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah
2. Menyusun program pembentukan pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota
3. Menyusun penguatan kelembagaan
 - a. Pemberdayaan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota
 - b. Harmonisasi Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Provinsi Kab/Kota
4. Melakukan monitoring aktivitas Pengurus Provinsi dan Pengurus Kab/Kota.

Kronologi/ Milestones

- Rapat Koordinasi I Div OPW & PPI Wilayah: 17 Feb 2022
- Rapat Internal Div OPW ttg Finalisasi PO Muswil: 27 Mei 2022
- PO Panduan Muswil dan Pembentukan Kepengurusan sudah terbit (PER-01/PPI/V/2022); dirilis pada acara Sosialisasi tgl 09 Juni 2022
- Keputusan KemenKUMHAM: AD PPI telah disetujui: 24 juni 2022
- MoU PPI dengan BRIN Juni 2022

PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

NOMOR : PER-01/PPI/V/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembentukan Pengurus Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 9, 12-14 Bab VI, pasal 26 Bab XIV dan pasal 35 Bab XXII Anggaran Dasar dan pasal 16-19 Bab VI-VII Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia tentang Pembentukan Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Perhimpunan Periset Indonesia;
2. Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor: 13/SK/PPI/IV/2022 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat PPI periode 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA.

AD Bab XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- 1) Pada saat organisasi profesi Perhimpunan Periset Indonesia terbentuk, maka Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) melebur menjadi Perhimpunan Periset Indonesia.
- 2) Khusus Pengurus Wilayah Himpenindo dan Pengurus Cabang Himperindo masih tetap berlaku dengan perubahan nama Perhimpunan Periset Indonesia sampai diadakan Musyawarah Wilayah dan Cabang yang diselenggarakan oleh masing-masing Wilayah dan Cabang atas rekomendasi Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Musyawarah Wilayah dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

ART: Bab VI

KEPENGURUSAN PROVINSI

Pasal 16

- 1) Pengurus Provinsi terdiri dari
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang atau Sub bidang sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- 2) Pengurus Provinsi dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- 3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi.
- 4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi.

Pasal 17

- 1) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- 2) Ketua Pengurus Provinsi terpilih membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- 3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah tiga tahun.

Pasal 26

Pengurus Provinsi

Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi adalah

- 1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Provinsi;
- 2) menyinergikan program Pengurus Provinsi dengan program Pengurus Pusat;
- 3) membantu pengawasan dan mengevaluasi program Pengurus Provinsi; dan
- 4) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- 5) bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi; serta
- 6) mempunyai kewenangan mengadakan dan melaksanakan kerjasama di tingkat provinsi.

Pasal 27

Pengurus Kab/ Kota

Tugas dan wewenang Pengurus Kabupaten/Kota adalah

- 1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kabupaten/ Kota;
- 2) menyinergikan program Kabupaten/ Kota dengan program Pengurus Provinsi dan program Pengurus Pusat;
- 3) bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten/ Kota;
- 4) mempunyai kewenangan mengadakan dan melaksanakan kerjasama di tingkat Kabupaten/ Kota.

Pasal 36

Wewenang Musyawarah Provinsi

Musyawarah Provinsi berwenang untuk

- 1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- 2) menetapkan garis besar program kerja Pengurus Provinsi dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres; dan
- 3) memilih Ketua Pengurus Provinsi yang baru.

Pasal 39

Wewenang Musyawarah Kab/ Kota

Musyawarah Kab/ Kota berwenang untuk

- 1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Kab/ Kota mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- 2) menetapkan garis besar program kerja Pengurus Kab/ Kota dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres; dan
- 3) memilih Ketua Pengurus Kab/ Kota yang baru.

PO ttg Pembentukan Pengurus PPI Wilayah

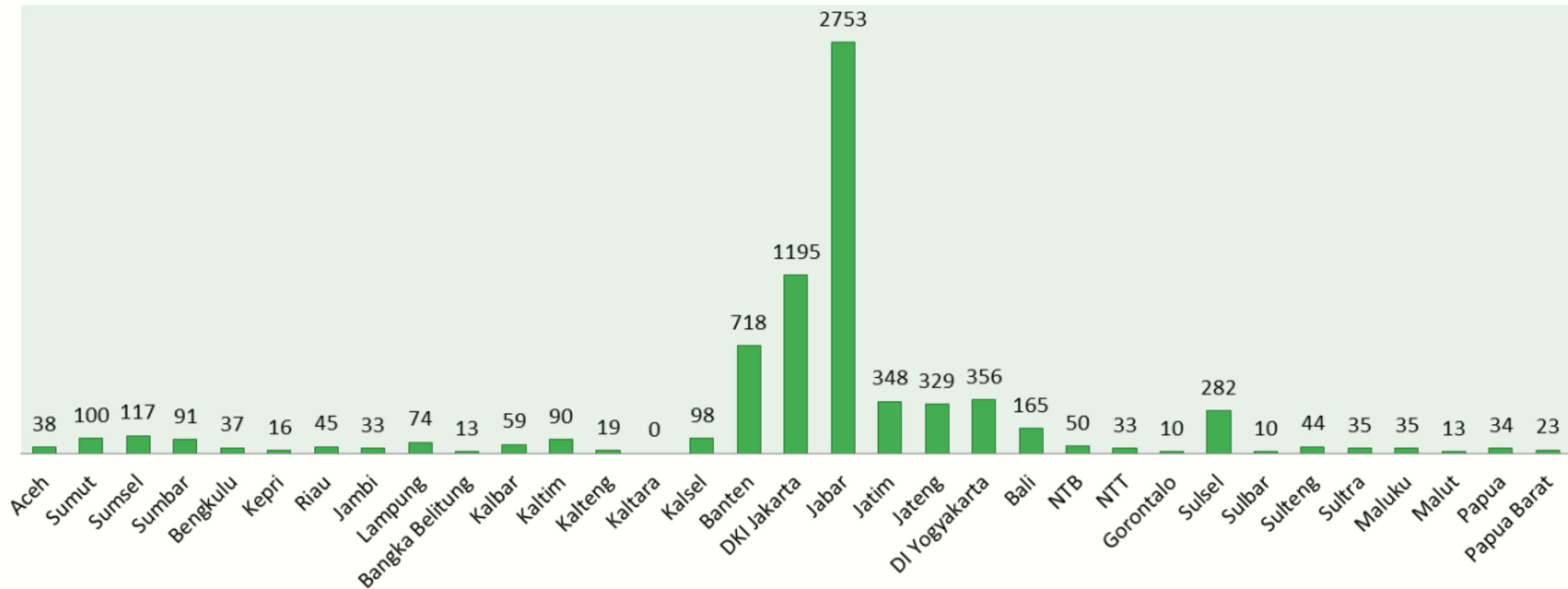
Bab 1 pasal 2: Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Provinsi, Kabupaten/Kota

- a) Pengurus Pusat melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk seseorang/tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan eks-Himpenindo, maka pengurus existing tersebut bertugas sebagai panitia penyelenggara Musyawarah Provinsi/ Kabupaten/Kota di wilayahnya melalui Surat Penugasan dari Pengurus Pusat.
- c) Dalam hal pengurus existing sebagaimana dimaksud ayat b) di atas terkendala untuk menyusun panitia penyelenggara Musyawarah, maka Pengurus Pusat melalui Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah, dapat menunjuk tim/inisiator untuk membantu proses penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memfasilitasi atau menginisiasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut.
- d) Untuk Wilayah yang sudah terbentuk kepengurusan eks-Himpenindo, dan tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam hal kepengurusan, maka tidak perlu diadakan Musyawarah.
- e) Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf d, Pengurus existing perlu dikukuhkan kembali dengan menggunakan nomenklatur organisasi yang baru

Kronologi/ Milestones pasca PO Pembentukan PPI Wilayah

- PPI Kota Bogor Muswil 01 Juli 2022; SK sdh dibentuk, pengukuhan sdh dilakukan tgl 31 Agustus 2022.
- PPI Wilayah Bekasi Raya terbentuk 15 Agustus 2022; SK sudah terbit
- PPI Prov Banten dan PPI Kota Tangsel Muswil 25 Agustus 2022, setelah kampanye kandidat ketua, 22 Agustus 2022; SK kepengurusan sudah terbit
- PPI Prov NTT terbentuk melalui Muswil 7 Oktober 2022, SK kepengurusan belum terbit
- Wilayah lain perlu dipantau dan diupdate rencana Muswilnya

ANGGOTA PPI



Daftar PPI Wilayah existing (ex-Himpenindo)

No	Nama PPI	Tanggal SK Himpenindo	Nama Ketua	Update
1.	Prov. Kalsel	27 Februari 2019	Prof. Dr. Ir. Masganti M.S	
2	Prov. DI Yogyakarta	18 April 2019	Prof. Dr. Ir. Gunawan M.S	(Tetap)
3	Prov. Sumsel	14 Juni 2019	Ir. Irwin Bizzy, M.T	(Tetap)
4	Prov. Kalbar	20 November 2019	Dr. Ir. Muhammad Hatta, M.Si	
5	Prov. Jawa Tengah	28 November 2019	Dr. Dra. Sri Yuwanti, MA, MPD	
6	Prov. Sumut	18 Oktober 2019	Ir. Musfal, M.P.	
7	Prov. DKI Jakarta	18 Oktober 2019	Dr. Ir. Usman Pasarai, M.Eng.	
8	Kota Tangsel	05 November 2019	Prof. Dr. Ratno Nuryadi	Dr. Agus Sukarto
9	Prov. Sulsel	30 Januari 2020	Prof. Dr. Idham, M.Pd	(Tetap)
10	Prov. Jawa Barat	07 Agustus 2020	Dr. Yuyu Wahyu	
11	Kota Bogor	10 Oktober 2020	Dr. Ir. Handewi P Saliem	Ir. Rachman Effendi
12	Prov. Banten	10 Desember 2020	Dr. Lukman Shalahuddin, M.Sc	Dr. Deni Shidqi Khairudini
13	Prov. Jawa Timur	24 Maret 2021	Dr. Ir. Anang Triwiratno, M.P.	(Tetap)
14	Prov. Lampung	17 Desember 2021	Dr. Ir. Robet Asnawi, M.Si.	(Tetap)

Wilayah baru

No.	Wilayah	Keterangan
1	Kota Bekasi	telah dibentuk PPI Bekasi Raya melalui Muswil 15 Agustus 2022; sudah keluar SK Pengurus
2	Prov Sultra	Telah diidentifikasi initiator (La Fariki) Lukman
3	Prov NTT	Muswil 7 okt; Tim Formatur sedang bekerja utk penetapan Kaetua dan pengurus
4	Prov Sumbar	SK penunjukan Initiator telah ada (Atman)
5	Prov Bali	Sudah dibuat SK penunjukan initiator
6	Prov Kaltim	Request/ pertanyaan dari Ari Sasmoko Adi (Balitbangda Kaltim)

Kondisi Status PPI Wilayah existing

No	Nama PPI	Update status/ rencana Musyawarah wilayah
1.	Prov. Kalsel	Segera, masih menunggu perpindahan ke BRIN. Jadwal Muswil belum ditetapkan. SK Panitia belum
2	Prov. DI Yogyakarta	banyak pengurus yang belum transisi ke BRIN-> reshuffle kecil, tidak perlu mengadakan Muswil
3	Prov. Sumsel	Target Muswil Des 2022; -> reshuffle kecil, tidak perlu mengadakan Muswil
4	Prov. Kalbar	Juli => akhir Agustus; sudah dibentuk SK Panitia Muswil, Ka OC: pak Eddy: rencana Muswil 31 Oktober Ita
5	Prov. Jawa Tengah	Rencana Agustus 2022 pekan ke III; menunggu pemetaan keanggotaan; rencana Muswil 14 Nov Arief
6	Prov. Sumut	SK Panitia Muswil sudah terbit
7	Prov. DKI Jakarta	Pengurus existing banyak yg tidak lagi menjabat Fungsional periset. Telah ditunjuk inisiator Hadi
8	Kota Tangsel	Sudah Muswil 25 Agustus 2022; SK kepengurusan sudah terbit
9	Prov. Sulawesi Selatan	Sudah dilakukan penetapan pengurus baru (Mei). SK baru sudah ada. Mohon Berita Acara
10	Prov. Jawa Barat	September=> Okt=> Nov Yuyu
11	Kota Bogor	Telah dilaksanakan Muswil 01 juli 2022. Mohon Berita Acara; sudah pengukuhan
12	Prov. Banten	Muswil gabungan dengan Kota Tangsel; 25 Agustus; SK kepengurusan sudah terbit
13	Prov. Jawa Timur	Rencana semula Juni-Juli; delay ke Agustus. Sudah rapat utk draft kepengurusan baru. (tidak jadi ada Muswil). Rencana pengukuhan 25 Okt Arief
14	Prov. Lampung	Meneruskan kepengurusan yang ada, termasuk penambahan kepengurusan dari Perekayasa. Sudah dilaksanakan. Mohon Berita Acara.

Kondisi Status PPI Wilayah existing

No	Nama PPI	Pengurus lama	Kepanitiaan Muswil	Pelaksanaan Muswil	Ketua baru terpilih	SK Peng. baru	Pengukuhan	Keterangan
1.	Prov. Kalimantan Selatan							
2	Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta				Ketua tetap			Reshuffle kecil
3	Prov. Sumatera Selatan			Des				=> reshuffle
4	Prov. Kalimantan Barat			31 Okt				
5	Prov. Jawa Tengah			14 Nov				
6	Prov. Sumatera Utara							
7	Prov. DKI Jakarta							Initiator sdh ada
8	Kota Tangerang Selatan							
9	Prov. Sulawesi Selatan				Ketua tetap			Reshuffle kecil
10	Prov. Jawa Barat							
11	Kota Bogor							
12	Prov. Banten							
13	Prov. Jawa Timur				Ketua tetap		25 Okt	Reshuffle kecil
14	Prov. Lampung				Ketua tetap			Reshuffle kecil

Kondisi Status PPI Wilayah Baru

No	Nama PPI	Kepanitiaan Muswil	Pelaksanaan Muswil	Ketua baru terpilih	SK Kepengurusan baru	Pengukuhan pengurus baru	Keterangan
15	Bekasi Raya		11 Aug	Jaizuludin			
16	Prov. NTT		7 Okt				Tim Formatur
17	Prov. Sultra	Initiator dan rapat konsolidasi	Des 2022				
18	Prov. Sumbar	Proses	29 nov				
19	Prov Bali	initiator					
20	Prov Kaltim						penjajagan
2`	Prov NAD						penjajagan

List to do

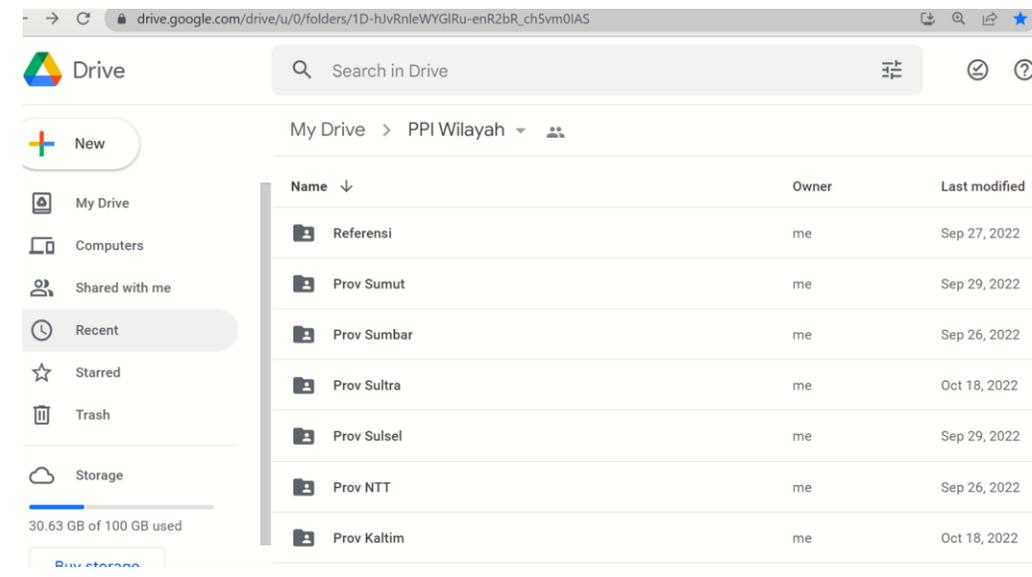
- Pengurus PPI ex Himpenindo yang belum Muswil agar menyiapkan LPJ; untuk disampaikan saat Muswil; **Kalsel, Kalbar, Sumsel, Sumut, Jateng, DKI, Jabar**
- Wilayah yang memutuskan Kepengurusan lama tetap (Ketua tetap) dan hanya reshuffle kecil, sehingga tidak perlu Muswil. Keputusan ini harus melalui suatu rapat pengurus, dan laporan keputusan rapat atau berita acara harap dikirimkan ke PPI Pusat. Selanjutnya buat surat utk pengukuhan: **Lampung, Sulsel, Jatim, DIY, Sumsel**.
- Susunan kepengurusan yang baru hasil Muswil ataupun tanpa Muswil harap dikirimkan ke PPI Pusat untuk dibuatkan SK Kepengurusan yang baru: **DIY, Sumsel, Lampung**
- Pengurus Baru hasil Muswil, sudah ada SK Kepengurusan, harap raker penyusunan program dan mengirimkan rencana utk Pengukuhan: **Bekasi Raya, Banten, Kota Tangsel**
- WAG utk Komunikasi dengan Pengurus PPI Wilayah; (Ketua baru PPI Banten, Tangsel, Bogor, Bekasi Raya sudah dimasukkan ke WAG Pengurus Prov Kab/ kota; next: Sekrt dan Bendaharanya; dan prov NTT)

Koordinasi antara Div OPW dengan Div Keanggotaan dan Div Komintal

- Isu keanggotaan dan sistem IT untuk bisa melihat data anggota suatu wilayah
- Sistem yang lebih otomatis untuk mengupdate kondisi wilayah: status, dokumen SK, dsb
- Next: mengoptimalkan Website dan Kantor Virtual

Untuk sementara dokumen terkait PPI wilayah ada di:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D-hJvRnleWYGIRu-enR2bR_ch5vm0IAS



Questionnaire untuk PPI wilayah

- Bagaimana Status PPI di Wilayah anda
 - a) Masih kepengurusan yang lama dan belum Muswil
 - b) Sudah kepengurusan yang baru
- Apakah sudah ada rencana Muswil? Kapan?
- Apakah sudah tergambar kepanitiaan Muswil
- Yang sudah kepengurusan baru: apakah sudah mengirimkan berita acara kepada PPI Pusat?

docs.google.com/forms/d/...

Questionnaire Kondisi PPI Wilayah

update kondisi PPI Wilayah, baik yang sudah terbentuk (existing), maupun yang baru

Sign in to Google to save your progress. [Learn more](#)

* Required

Email *

Your email

Nama Responden

Your answer

Sebutkan PPI Wilayah yang anda wakili *

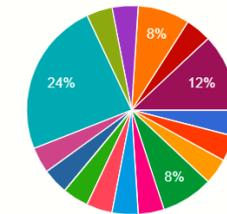
- Sumatera Utara
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Sulawesi Selatan
- Kota Tangerang Selatan
- Kota Bogor
- Bekasi Raya
- Provinsi NTT
- Wilayah Baru (sebutkan di next question)

Jika Wilayah baru maka sebutkan (Provinsi/ Kota/ Kab)

Your answer

Sebutkan PPI Wilayah yang anda wakili

25 responses

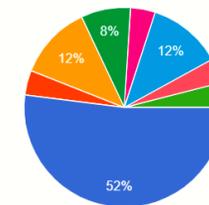


- Sumatera Utara
- Sumatera Selatan
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Selatan
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat

1/3

Posisi anda dalam kepengurusan tersebut

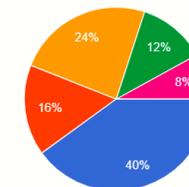
25 responses



- Ketua Umum
- Wakil ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Anggota Pengurus
- Initiator
- Eks. Sekretaris Himpenindo
- Wakil bendaha

Masuk kategori manakah wilayah anda

25 responses

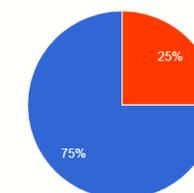


- Wilayah Lama dan sudah terselenggara Muswil
- Wilayah Lama, namun tidak terdapat perubahan kepengurusan selain hany...
- Wilayah lama, dan belum terselenggara Muswil
- Wilayah Baru, dan sudah terselenggara Muswil
- (Calon) Wilayah Baru yang dalam proses untuk terbentuk dengan akan t...

Copy

Jika Wilayah anda sudah menyelenggarakan Muswil ataupun reshuffe kepengurusan baru, apakah sudah dilaporkan ke PPI pusat sebagai berita acara atau Laporan Hasil rapat

16 responses



- Sudah
- belum (mohon dikirimkan segera)

Copy

Apa saja yang dibutuhkan PPI Wilayah?

- AD ART PPI
- PO pembentukan wilayah
- Contoh TOR dan undangan Muswil
- Contoh penunjukan Initiator
- Contoh SK kepanitiaan
- Contoh SK kepengurusan
- LPJ termasuk pertanggung jawaban keuangan (e-financial)

DATA ANGGARAN WILAYAH

No	Wilayah	Hak Wilayah	Transfer ke Wilayah	Realisasi
1	KOTA BOGOR	162,240,000	31,650,000	31,651,198
2	KOTA TANGERANG SELATAN	159,600,000	98,400,000	27,517,600
3	SUMATERA UTARA	33,600,000	0	0
4	SUMATERA SELATAN	43,680,000	33,880,000	0
5	DKI JAKARTA	385,000,000	264,740,000	94,429,000
6	JAWA BARAT	524,880,000	261,240,000	94,521,021
7	JAWA TENGAH	99,820,000	62,580,000	24,496,000
8	DI YOGYAKARTA	123,200,000	85,540,000	43,329,500
9	JAWA TIMUR	42,280,000	1,960,000	0
10	BANTEN	52,620,000	20,240,000	4,949,300
11	KALIMANTAN BARAT	18,900,000	12,320,000	6,385,700
12	KALIMANTAN SELATAN	36,400,000	25,620,000	0
13	SULAWESI SELATAN	83,440,000	46,480,000	29,480,000
14	Sekretariat	0	0	339,821,592

Terakhir hak wilayah yg ditransfer pd semester I th 2021. Jd msh ada dana yg blm ditransfer:-Semester II th 2021-Semestet I th 2022-Semestet II th 2022



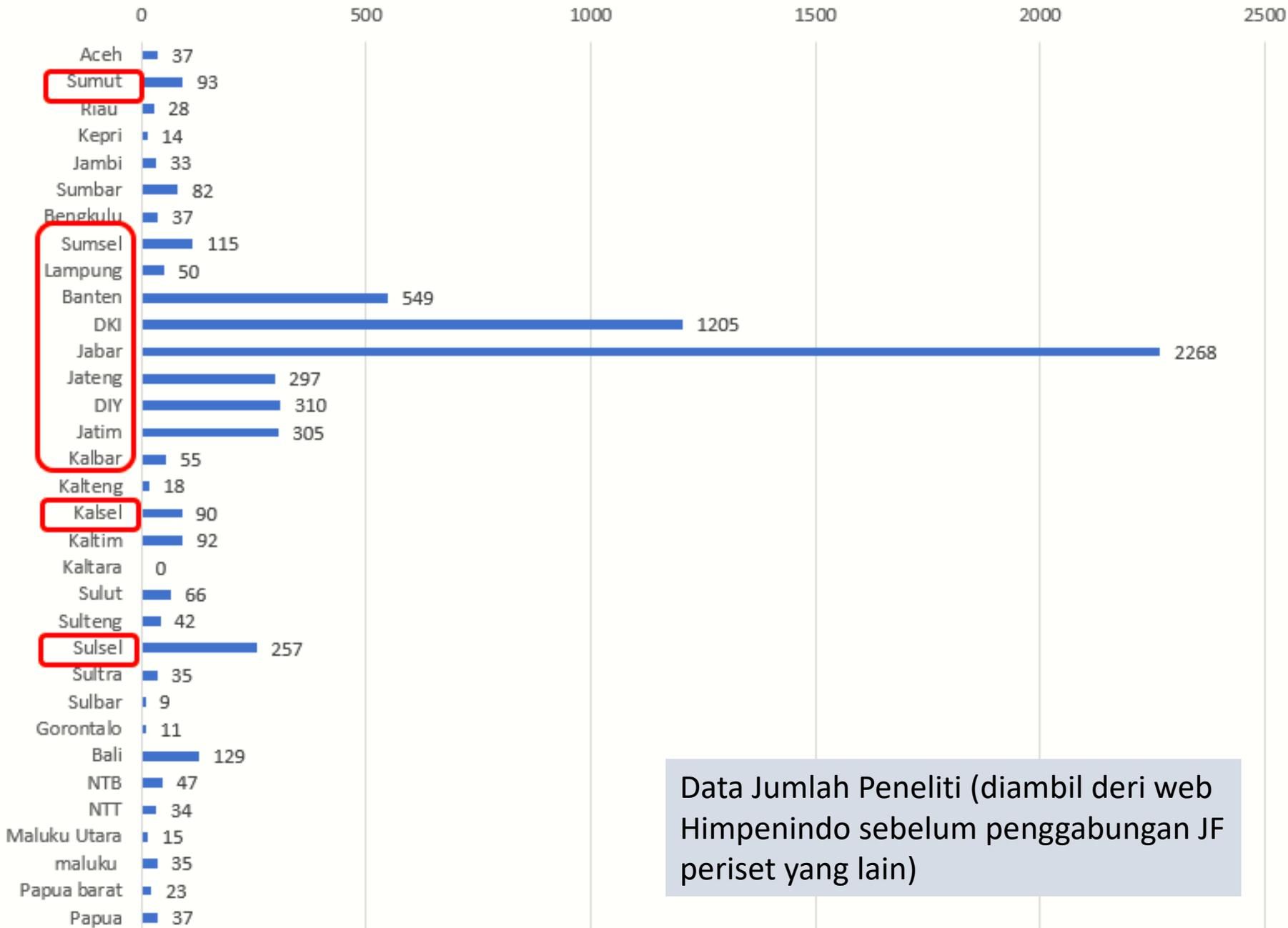
Terima Kasih ...

LAMPIRAN: Program Div OPW, Data Keanggotaan

Program Divisi OPW Jangka Menengah 2023-2025

No		2023	2024	2025
1	Koordinasi dengan Pengurus lama PPI Wilayah (ex Himpenindo/ himperindo)			
2	Penetapan tata cara pembentukan PPI Wilayah			
3	Pembentukan pengurus baru PPI Wilayah existing			
4	Pembentukan PPI wilayah yg baru			
5	FGD penguatan Kelembagaan PPI Wilayah			
6	Monitoring			
7	Harmonisasi PPI Pusat-Wilayah			

Jumlah Anggota Himpenindo berdasarkan Wilayah



Data Jumlah Peneliti (diambil dari web Himpenindo sebelum penggabungan JF periset yang lain)

12 Provinsi +
2 Kota: Tangsel, Bogor

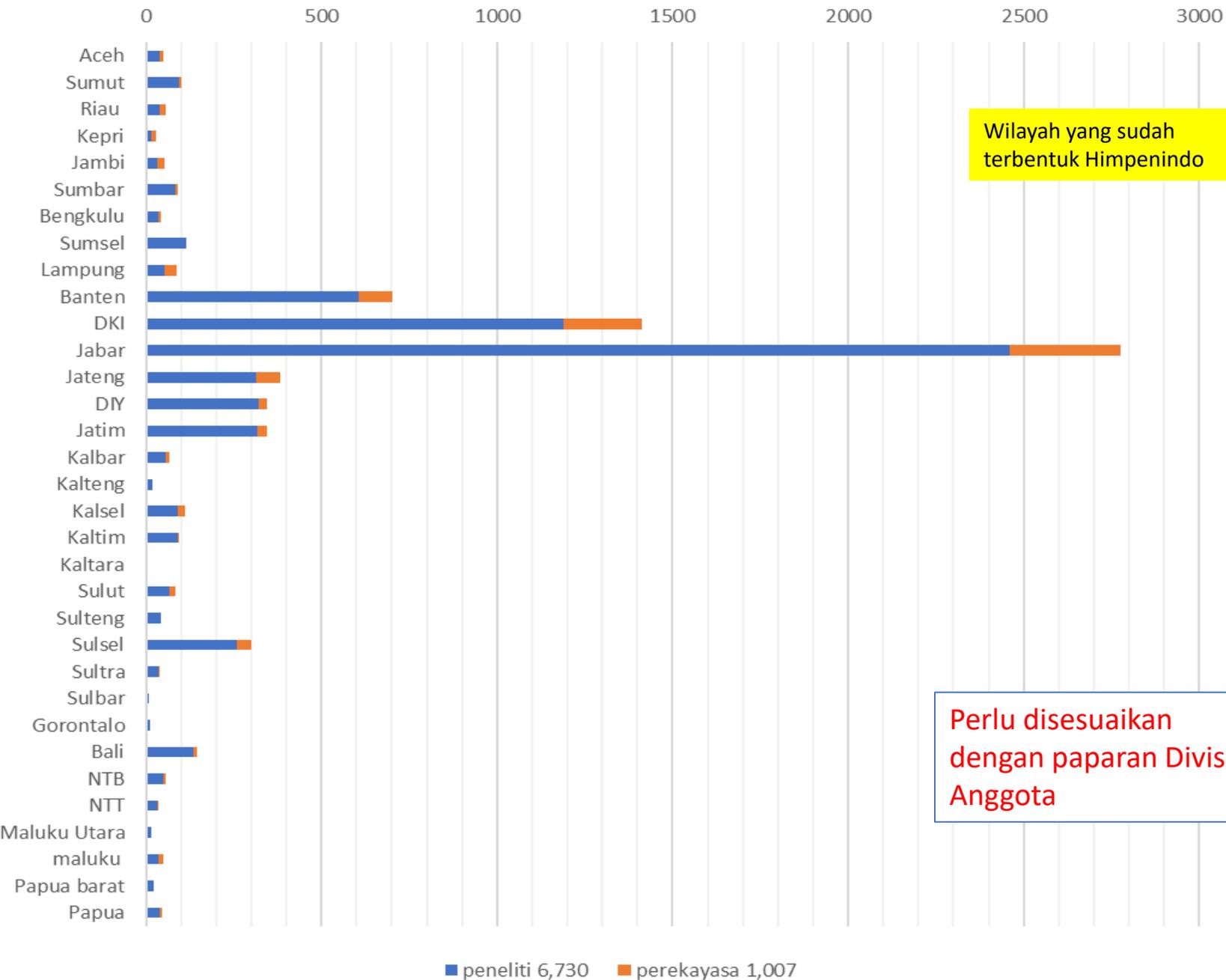
4 Provinsi yg potensial:

- Sumbar
- Kaltim
- Sulut
- Bali

Data Anggota perlu di Update sehubungan dengan:

- Penggabungan 11 JF periset
- Pemetaan SDM Iptek BRIN
- Pembentukan BRIDA
- Alih Jabatan

Distribusi Anggota Peneliti dan Perekayasa menurut Wilayah Provinsi



Wilayah yang sudah terbentuk Himpenindo

Perlu disesuaikan dengan paparan Divisi Anggota

	Peneliti	perekayasa
Aceh	38	12
Sumut	95	7
Riau	38	20
Kepri	15	13
Jambi	32	21
Sumbar	84	7
Bengkulu	37	6
Sumsel	116	
Lampung	54	34
Banten	607	96
DKI	1188	225
Jabar	2459	316
Jateng	313	70*
DIY	320	25
Jatim	317	28
Kalbar	58	9
Kalteng	18	
Kassel	92	18
Kaltim	92	2
Kaltara	0	
Sulut	67	16
Sulteng	43	
Susel	260	40
Sultra	35	4
Sulbar	9	
Gorontalo	11	
Bali	136	8
NTB	50	6
NTT	34	1
Maluku Utara	15	
maluku	36	14
Papua barat	23	
Papua	38	9
Total	6730	1007

REKAPITULASI DATA ANGGOTA/POTENSI ANGGOTA PPI

A. DATA ANGGOTA PPI JF dalam pembinaan BRIN

rev 2 bei 21-02-2022

No	JABATAN FUNGSIONAL		PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL (orang)									TOTAL	Prosentase
			PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA			
1	Peneliti	DATA BRIN	2,303	2,476	1,986	791					7,556		
		ANGG PPI									6,492	85.92%	
2	Perekayasa	DATA BRIN	887	1,033	919	208					3,047		
		ANGG PPI									570	18.71%	
3	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa)	DATA BRIN					87	649	696	882	2,314		
		ANGG PPI									6	0.26%	
4	Analisis Pemanfaatan Iptek	DATA BRIN	7	16	8	3					34		
		ANGG PPI									1	2.94%	
5	Analisis Data Ilmiah	DATA BRIN	1	3	-	1					5		
		ANGG PPI									-	0.00%	
6	Penata Penerbitan Ilmiah	DATA BRIN	10	3							13		
		ANGG PPI									-	0.00%	
7	Analisis Perkebunrayaan	DATA BRIN	10								10		
		ANGG PPI									3	30.00%	
8	Teknisi Perkebunrayaan	DATA BRIN									-		
		ANGG PPI									-	#DIV/0!	
9	Kurator Koleksi Hayati	DATA BRIN									-		
		ANGG PPI									-	#DIV/0!	
10	Pengembang Teknologi Nuklir	DATA BRIN	144	166	125	15					450		
		ANGG PPI									5	1.11%	
11	Pranata Nuklir	DATA BRIN						96	110	162	368		
		ANGG PPI									-	0.00%	

Perlu data menurut sebaran wilayah

POTENSI	13,797	
ANGG PPI	7,077	51.29%

B. DATA ANGGOTA PPI JF Non Pembinaan BRIN

12	Dosen	ANGG PPI									4
13	Analisis Anggaran	ANGG PPI									1
14	Analisis Kebijakan	ANGG PPI									1
										ANGG PPI	6

Disusun oleh Divisi Keanggotaan PPI, data berbasis tanggal 21 Februari 2022 -denbei-

Total Angg PPI	7,083
----------------	-------

Dalam tahap validasi	1,571
----------------------	-------